

**LAPORAN KINERJA
(LAKIN)
TAHUN 2023**



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANWIL PAPUA, PAPUA BARAT
DAN MALUKU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG JAYAPURA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	iii
EXECUTIVE SUMMARY	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. GAMBARAN UMUM KPKNL JAYAPURA.....	1
B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN KPKNL JAYAPURA	7
1. Aspek Strategis KPKNL Jayapura	7
a. Aspek secara internal.....	7
a. Aspek secara eksternal	11
2. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issues</i>) KPKNL Jayapura.....	11
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	17
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	17
1. Membandingkan Antara Realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan.....	17
a. Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan lima tahun terakhir	18
2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	19
3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan Atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang telah Dilakukan	21
4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	22
5. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	24
6. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja.....	27
7. Rencana Aksi ke depan	28
B. REALISASI PENGGUNAAN ANGGARAN DIPA TAHUN 2023	29
BAB IV PENUTUP	30
Lampiran	31

KATA PENGANTAR

Penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tahun 2023 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura yang terdiri dari Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2023, Pengukuran Kinerja tahun 2023, Rencana Kerja Tahunan (RKT) tahun 2023 dan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dilaksanakan oleh KPKNL Jayapura dan sebagai perwujudan atas kewajiban setiap instansi pemerintah sebagai penyelenggara Negara untuk menyusun rencana strategisnya masing-masing dalam melaksanakan akuntabilitas kinerja pemerintah agar tercapai penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan pelaporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 bahwa setiap instansi pemerintah harus membuat Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Pertanggung jawaban atas pelaporan keuangan pada KPKNL Jayapura disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja (LAKIN). LAKIN KPKNL Jayapura Tahun Anggaran 2023 disusun dalam rangka merealisasikan pertanggungjawaban atas keberhasilan/kegagalan pencapaian target yang dibebankan kepada KPKNL Jayapura selama tahun 2023.

Laporan Kinerja (LAKIN) ini juga berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif, dan sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Jayapura dalam rangka menuju terwujudnya good governance, serta sebagai umpan balik guna lebih meningkatkan kinerja KPKNL Jayapura dalam waktu yang akan datang. Disamping itu, berfungsi pula sebagai input bagi kantor pusat dalam rangka melaksanakan penilaian produktivitas kantor-kantor vertikal.

Laporan Kinerja (LAKIN) ini juga memuat laporan pencapaian kinerja tahun 2023, serta menceritakan keberhasilan dan hambatan yang terjadi selama tahun 2023. Adapun keberhasilan dan hambatan yang terjadi selama tahun 2023 itu akan dibahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

Tersusunnya LAKIN tahun 2023 KPKNL Jayapura tidak terlepas dari dukungan dan kerjasama seluruh jajaran KPKNL Jayapura. Untuk itu kami ucapkan terimakasih untuk semua pihak yang telah membantu baik itu secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan LAKIN KPKNL Jayapura ini sehingga dapat tersusun sedemikian rupa.

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan, baik kepada Kantor Pusat DJKN maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi KPKNL Jayapura, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya.

Jayapura, 23 Januari 2024
Kepala KPKNL Jayapura



Ditandatangani secara elektronik
Dadang Eko Darminto

IKHTISAR EKSEKUTIF

Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah "Menjadi Pengelola Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang yang profesional dan bertanggung jawab untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan Misi, terdiri dari:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
4. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
5. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Mengacu pada visi dan misi tersebut diatas, KPKNL Jayapura pada tahun 2023 memfokuskan kegiatan penyusunan LAKIN pada dua misi yaitu misi fiskal dan misi kelembagaan. Dalam menjalankan misi tersebut ditetapkanlah tujuan dan sasaran yang selanjutnya ditentukan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut, yaitu melalui penetapan kebijaksanaan, program dan kegiatan.

Berdasarkan hal tersebut disusunlah tujuan yang hendak dicapai KPKNL Jayapura sebagai berikut:

1. Meningkatkan penerimaan Negara melalui pengurusan Piutang Negara dan Lelang.
2. Mengoptimalkan administrasi pengurusan Piutang Negara dan Lelang.
3. Mewujudkan pengelolaan kekayaan negara yang akuntabel dan transparan.

Dalam rangka mencapai tujuan tersebut KPKNL Jayapura telah melakukan beberapa kegiatan yang dapat diukur melalui Indeks Kinerja Utama (IKU). Indeks Kinerja Utama KPKNL Jayapura terdiri dari 9 Sasaran Strategis dan 20 Indeks Kinerja Utama. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain:

1. Melaksanakan tugas pokok dan fungsi berpegang teguh pada payung hukum sebagaimana peraturan yang berlaku.
2. Upaya peningkatan koordinasi dan sosialisasi terhadap stakeholder melalui media email, sms, call center, media website KPKNL Jayapura maupun DJKN.
3. Melakukan pertemuan-pertemuan dengan stakeholder secara rutin untuk meningkatkan sinergi, persamaan persepsi terhadap permasalahan yang ada.
4. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pengusulan diklat, FGD, In house training dan rapat rutin.
5. Meningkatkan kualitas pelayanan dengan cara memperbaiki prosedur kerja, menata ruang kerja, sikap perilaku, integritas dan disiplin pegawai.
6. Efisiensi anggaran melalui sinergi pelaksanaan tugas antar seksi, arsip digital, dan menyusun skala prioritas pelaksanaan tugas.
7. Mengoptimalkan potensi pegawai yang ada dengan membentuk tim kreatif yang tergabung dari beberapa seksi untuk mencari inovasi-inovasi pelayanan.
8. Meningkatkan kerjasama dengan pemerintah daerah untuk menggali potensi penilaian dan lelang
9. Perbaikan sarana dan prasarana untuk mendukung tugas pokok dan fungsi
10. Menciptakan suasana kerja yang akrab, solid dan kondusif serta penuh kekeluargaan

Dari kegiatan diatas, KPKNL Jayapura mencapai Nilai Kinerja Organisasi (NKO) sebesar 108,81%

Namun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi KPKNL Jayapura menghadapi beberapa kendala antara lain:

1. Belum meluasnya informasi tentang lelang ke masyarakat dan masih rendahnya tingkat daya beli masyarakat terhadap obyek lelang khususnya di masa pandemi saat ini;
2. Kendala tanah adat dengan hak ulayat yang masih dominan di wilayah Papua;
3. Wilayah kerja yang sangat luas, sementara transportasi yang terbatas;
4. Lelang e-auction membutuhkan dukungan jaringan yang memadai sementara kondisi di Papua belum banyak didukung oleh jaringan yang memadai;
5. Minimnya jumlah Pengurusan Piutang Negara yang diserahkan kepada KPKNL Jayapura;
6. Seluruh BKPN yang di serahkan pengurusannya kepada KPKNL dengan tanpa adanya jaminan/agunan serta keberadaan debitur/penanggung hutang yang tidak jelas;
7. Penguasaan maupun pengelolaan asset idle belum sepenuhnya dapat dilakukan oleh KPKNL Jayapura. Hal ini disebabkan oleh satker yang menguasai aset idle kurang berkenan jika aset tersebut diserahkan kepada KPKNL Jayapura.

Dengan tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja KPKNL Jayapura tahun 2023, diharapkan KPKNL Jayapura dapat sernakin terdorong dan termotivasi untuk rneningkatkan kinerjanya sejalan dengan visi dan rnisi yang hendak dicapai. Selain itu, juga diharapkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan akan dapat dievaluasi, sehingga untuk pelaksanaan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

BAB I PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa setiap instansi pemerintah wajib melaksanakan pelaporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban instansi pemerintah atas pencapaian tujuan/sasaran strategis organisasi. Dalam rangka memenuhi ketentuan tersebut, maka Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jayapura menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang terdiri dari: Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2023, Pengukuran Kinerja Tahun 2023, Rencana Kinerja Tahunan 2023 dan Penetapan Kinerja Tahun 2023.

Penyusunan LAKIN Tahun 2023 ini bertujuan agar KPKNL Jayapura dapat mengetahui sejauh mana pencapaian kinerja yang telah dicapai selama tahun 2023 dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2023.

Berikut ini merupakan gambaran umum serta aspek strategis dan permasalahan KPKNL Jayapura.

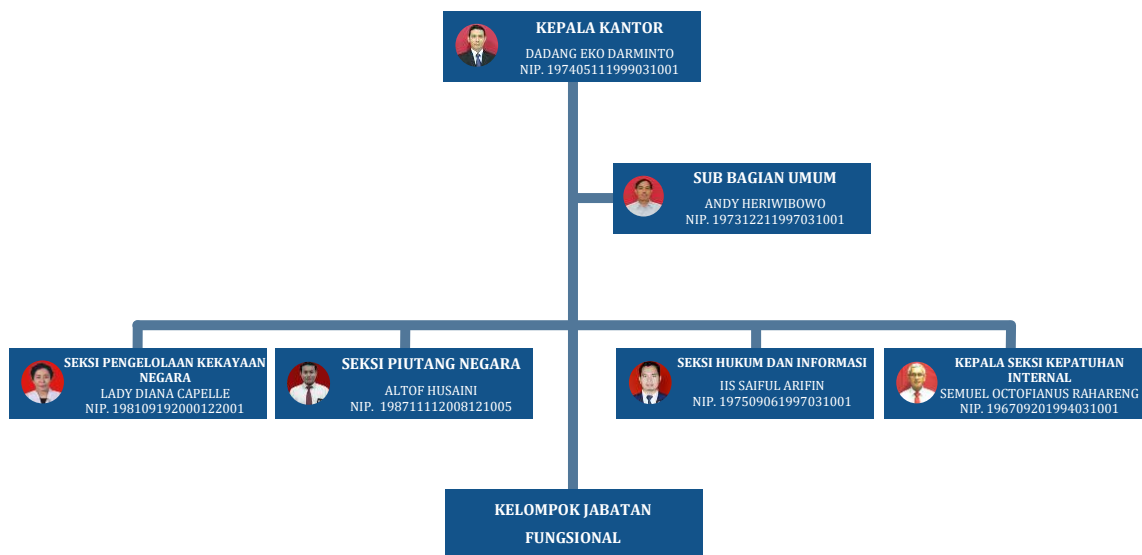
A. GAMBARAN UMUM KPKNL JAYAPURA

KPKNL Jayapura adalah suatu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, yang mempunyai kewenangan untuk melakukan Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang Negara dan Lelang di wilayah Provinsi Papua, Papua Barat dan Maluku. Hal ini dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. KPKNL Jayapura terdiri dari 1 jabatan struktural eselon III.a (Kepala Kantor), 5 eselon IV.a (Kepala Seksi dan Kepala Subbagian Umum) dan kelompok jabatan fungsional yaitu :

- a) Subbagian Umum, mempunyai melakukan penyusunan rencana dan pemantauan program serta dukungan teknis bagi pemangku jabatan fungsional, urusan sumber daya manusia, analisis beban kerja, keuangan, tata usaha, rumah tangga, kearsipan, perencanaan, pehgadaan, penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara serta pengelolaan area terpadu di lingkungan KPKNL.
- b) Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara, mempunyai mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, pemusnahan, pengawasan, pengendalian, bimbingan teknis, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan laporan/ daftar barang milik negara/kekayaan negara.
- c) Seksi Piutang Negara, mempunyai tugas penyiapan bahan pelaksanaan pengurusan piutang negara dan kewenangan Panitia Urusan Piutang Negara, bimbingan teknis, dan pembinaan, penatausahaan, penagihan serta optimalisasi dalam rangka pengelolaan piutang negara.

- d) Seksi Hukum dan Informasi, mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, Jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, peny1apan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.
- e) Seksi Kepatuhan Internal mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.
- f) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Bagan Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Jayapura saat ini dapat dilihat pada Bagan I berikut :



KPKNL Jayapura mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara dan lelang dengan wilayah kerja seluas 392x Provinsi DKI Jakarta yang terdiri 1 (satu) Kota dan 20 Kabupaten yang mencakup 4 provinsi sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Kota Jayapura | 11. Kabupaten Asmat |
| 2. Kabupaten Jayapura | 12. Kabupaten Mimika |
| 3. Kabupaten Keerom | 13. Kabupaten Mappi |
| 4. Kabupaten Sarmi | 14. Kabupaten Mamberamo Raya |
| 5. Kabupaten Jayawijaya | 15. Kabupaten Mamberamo Tengah |
| 6. Kabupaten Pegunungan Bintang | 16. Kabupaten Nduga |
| 7. Kabupaten Yahukimo | 17. Kabupaten Yalimo |
| 8. Kabupaten Tolikara | 18. Kabupaten Puncak Jaya |
| 9. Kabupaten Puncak Jaya | 19. Kabupaten Intan Jaya |
| 10. Kabupaten Merauke | 20. Kabupaten Lanny Jaya |
| Kabupaten Boven Digoel | |

Dalam melaksanakan tugas, KPKNL Jayapura menyelenggarakan fungsi yaitu:

- a) Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
- b) Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
- c) Registrasi penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;

- d) Penyiapan barang pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan/atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
- e) Pelaksanaan pelayanan penilaian;
- f) Pelaksanaan pelayanan lelang;
- g) Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang;
- h) Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
- i) Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lain;
- j) Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
- k) Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
- l) Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang negara dan lelang;
- m) Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang;
- n) Pelaksanaan administrasi KPKNL.

KPKNL Jayapura sebagai instansi vertikal DJKN yang diberi mandat untuk mengelola barang telah melakukan berbagai upaya yang maksimal untuk merapikan manajemen aset negara menuju terlaksananya tertib administrasi, tertib hukum dan tertib fisik dalam pengelolaan kekayaan negara serta utilisasi aset negara yang optimal. Secara umum tugas dan fungsi KPKNL Jayapura dikelompokkan ke dalam dua tema pokok, yaitu :

B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN KPKNL JAYAPURA

1. Aspek Strategis KPKNL Jayapura

Aspek Strategis KPKNL Jayapura terbagi dalam dua hal yaitu : Aspek secara internal dan eksternal yaitu :

a. Aspek secara internal

1. Secara hukum KPKNL Jayapura memiliki kedudukan dan peranan yang sangat strategis dalam Pengelolaan Kekayaan Negara, Piutang dan Lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
2. Memiliki Sumber Daya manusia yang sesuai dibidangnya dan sarana prasarana yang cukup memadai. Adapun jumlah pegawai yang ada di lingkungan KPKNL Jayapura tahun 2023 berjumlah 21 pegawai dengan komposisi sebagaimana Tabel berikut :

1) Berdasarkan Golongan

Tabel I

Komposisi Pegawai KPKNL Jayapura Berdasarkan Golongan

No.	Golongan	Laki-Laki	Perempuan	Total Pegawai
1.	I	-	-	-
2.	II	8 orang	-	8 orang
3.	III	10 orang	2 orang	12 orang
4.	IV	1 orang	-	1 orang
TOTAL		19 orang	2 orang	21 orang

Berdasarkan hasil pemetaan dari golongan, KPKNL Jayapura mempunyai total pegawai sebanyak 21 orang, yang terdiri dari 19 orang laki-laki dan 2 orang perempuan. Golongan III merupakan golongan terbanyak di KPKNL Jayapura yaitu 12 orang diikuti 8 orang golongan II dan 1 orang golongan IV.

2) Berdasarkan Pendidikan

Tabel II

Komposisi Pegawai KPKNL Jayapura Berdasarkan Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Golongan				Total Orang
		I	II	III	IV	
1.	SLTA	-	-	1 orang	-	1 orang
2.	DI	-	3 orang	-	-	3 orang
3.	DIII	-	5 orang	-	-	5 orang
4.	S1	-	-	9 orang	-	9 orang
5.	S2	-	-	2 orang	1 orang	3 orang
TOTAL		-	8 orang	12 orang	1 orang	21 orang

Berdasarkan tingkat pendidikan, KPKNL Jayapura memiliki beragam tingkat pendidikan dari tingkat SLTA sampai ke tingkat pendidikan paling tinggi yaitu Strata 2. Dari segi tingkat pendidikan KPKNL Jayapura mempunyai 3 (tiga) orang yang berasal dari Strata 2, 9 (sembilan) orang yang berasal dari Strata 1, kemudian 5 (lima) orang dari Diploma III, 3 (tiga) orang dari Diploma I, dan 1 (satu) orang dari SLTA. Beragamnya jenis tingkat pendidikan di KPKNL Jayapura tidak menutup kemungkinan setiap pegawai untuk berbagi ilmu dan pengalaman yang dimiliki oleh pegawai satu dengan pegawai lainnya.

3) Berdasarkan Umur dan Golongan

Tabel III

Komposisi Pegawai KPKNL Jayapura Berdasarkan Umur dan Golongan

Umur	Golongan Ruang				Jumlah
	I	II	III	IV	
18-30	-	8	3	-	11
31-40	-	-	4	-	4
41-50	-	-	3	1	4
>50	-	-	2	-	2
Total	-	8	12	1	21

4) Berdasarkan Jabatan Tenaga Fungsional

Tabel III

Jumlah Jabatan Tenaga Fungsional & non fungsional

No	Jabatan Fungsional	Jumlah Orang
1	Juru Sita	2
2	Pemeriksa	1
3	Pejabat Lelang	2
4	Fungsional Penilai Pemerintah dan non fungsional	3
	Total	7

KPKNL Jayapura mempunyai 6 orang yang memegang jabatan fungsional, adapun jabatan fungsional itu antara lain: Juru Sita 2 (dua) orang, Pejabat Lelang 2 (dua) orang, Penilai Pemerintah & non fungsional sebanyak 2 (dua) orang.

Adapun dalam kegiatan operasionalnya KPKNL Jayapura beralamat di Gedung Keuangan Negara Lantai 4, Jalan Ahmad Yani No. 8, Gurabesi, Jayapura Utara, Kota Jayapura guna kelancaran tugas KPKNL Jayapura juga ditunjang dengan sarana dan prasarana sebagai berikut :

- Kendaraan operasional sebanyak 12 unit yang terdiri dari 6 unit mobil dan 6 unit sepeda motor.
- Personal Komputer sebanyak 11 unit dan laptop sebanyak 28 unit.
- Ruang kerja dan rapat yang ber-AC.
- Serta sarana penunjang lainnya.

3. KPKNL Jayapura mempunyai peran strategis untuk mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku.

Untuk mewujudkan reformasi birokrasi di lingkungan Kanwil DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, KPKNL Jayapura telah melakukan upaya-upaya peningkatan pelayanan yang optimal dan professional yaitu melalui upaya yang telah dilakukan dengan membangun citra organisasi yang baik, , Penataan ruang pelayanan, penambahan ruang untuk pertemuan dan pembinaan, sarana kerja yang mendukung kelancaran kerja, peningkatan kenyamanan ruang kerja, dan penataan atau penertiban kembali administrasi laporan untuk masing-masing seksi. KPKNL Jayapura dengan didukung oleh sumber daya yang ada senantiasa berusaha untuk memanfaatkan peluang dalam wilayah kerjanya untuk meningkatkan pelayanan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak. Adapun peluang-peluang tersebut dapat berupa dari penggalan potensi lelang, pengurusan piutang negara, dan pengelolaan

kekayaan negara. Dari segi lelang terlihat adanya peluang untuk lelang barang sitaan, temuan, rampasan dan penghapusan yang berpotensi untuk meningkatkan penerimaan negara. Sedangkan dari pengurusan piutang negara potensi penerimaan negara berasal dari penyelesaian piutang yang masih didukung oleh barang jaminan.

b. Aspek Strategis Secara Eksternal

1. Aspek Geografi yaitu wilayah kerja KPKNL Jayapura yang sangat luas 392x wilayah Propinsi DKI Jakarta, dengan 530 satker tersebar meliputi 1 kota dan 20 Kabupaten di wilayah Papua.
2. Wilayah kerja yang memiliki potensi Sumber Daya Alam yang melimpah, baik itu dari hasil hutan, tambang, perkebunan maupun pertanian.

2. Permasalahan Utama (*Strategic Issues*) KPKNL Jayapura

Dalam mewujudkan tujuan-tujuannya KPKNL Jayapura mempunyai Visi yang sejalan dengan Visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yaitu: " Menjadi pengelola kekayaan negara yang profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat ", merupakan cita-cita dan arah dari tujuan akhir pengelolaan kekayaan negara sesuai dengan jiwa pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan, maka KPKNL Jayapura menetapkan Misi, yang terdiri dari:

1. Mewujudkan optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektifitas pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah;
4. Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel;

6. Mewujudkan lelang yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

Misi merupakan suatu pernyataan yang berisi tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh suatu organisasi serta digunakan sebagai pedoman dan landasan kerja. Jadi dapat kita ketahui bahwa tujuan merupakan implementasi dan penjabaran dari misi yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu.

Adapun untuk mendukung visi dan misi tersebut, KPKNL Jayapura mempunyai tujuan yaitu :

1. Meningkatkan Penerimaan Negara Melalui Pengurusan Piutang Negara dan Lelang Serta Mengoptimalkan Administrasi Pengurusan Piutang Negara dan Lelang (PPNL).
2. Peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara.
3. Peningkatan kualitas perencanaan kebutuhan Barang Milik Negara.
4. Peningkatan pelayanan penilaian.
5. Peningkatan pelayanan lelang.

Tujuan tersebut mesti dapat dicapai sesuai yang diharapkan pada setiap tahun anggaran.

Sedangkan sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh KPKNL Jayapura dalam rumusan yang lebih spesifik terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan (satu tahun). Sasaran KPKNL Jayapura tersebut meliputi **Tercapainya Target Penerimaan Pengurusan Piutang dan Lelang Negara, Terwujudnya penggunaan Layanan Yang Tinggi dan Terwujudnya Pengurusan Kekayaan Negara Yang Optimal**. Maka dari itu antara tujuan dan sasaran harus sejalan agar misi yang telah kita tetapkan dapat berhasil dan berjalan dengan baik sesuai harapan.

Namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa permasalahan utama yang merupakan tantangan yang harus dihadapi yaitu :

1. Tidak sebandingnya beban kerja yang ditanggung oleh KPKNL Jayapura dengan jumlah SDM yang ada. Hal ini dapat kita lihat pada tabel I, II dan III dapat kita simpulkan bahwa jumlah pegawai yang ada, tidak sebanding dengan luas wilayah kerja yang ada, yang mana hampir meliputi seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Papua yang luasnya 392x Provinsi DKI Jakarta. KPKNL Jayapura yang hanya didukung sumber daya manusia sebanyak 21 pegawai dengan tingkat pendidikan bervariasi mulai dari SLTA hingga Strata 2. Kondisi ini masih tidak sebanding dengan beban kerja yang ditanggung oleh KPKNL Jayapura.
2. Kondisi geografis yang meliputi cakupan wilayah kerja yang sangat luas juga merupakan tantangan tersendiri terutama mencakup mobilisasi semua harus menggunakan pesawat dengan biaya yang mahal.
3. Daya beli masyarakat terhadap minat lelang masih rendah.
4. Permasalahan tanah hak ulayat yang masih dominan di wilayah Papua.
5. Sarana jaringan telekomunikasi yang belum memadai.
6. Sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pekerjaan kurang memadai

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

KPKNL Jayapura dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada tahun 2023 telah melakukan penyusunan program. Adapun program tahun 2023 KPKNL Jayapura yaitu sebagai berikut:

1. Percepatan pelayanan pengurusan piutang negara;
2. Peningkatan pelayanan pengelolaan kekayaan negara;
3. Peningkatan pelayanan lelang
4. Peningkatan pelayanan penilaian
5. Optimalisasi upaya penanganan perkara;
6. Peningkatan pelayanan di bidang kepegawaian;
7. Peningkatan pelayanan di bidang keuangan;
8. Peningkatan pelayanan di bidang rumah tangga.

Selain yang ditulis diatas program yang akan diteruskan dari tahun sebelumnya oleh KPKNL Jayapura antara lain adalah:

1. Peningkatan efektifitas pengelolaan kekayaan negara. Peningkatan kekayaan negara adalah suatu peran strategis dan menjadi salah satu indikator penting dalam pengendalian anggaran negara dan sebagai upaya perwujudan akuntabilitas tata kelola keuangan negara.
2. Peningkatan penerimaan dan pengamanan keuangan negara. Dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara menjelaskan bahwa keuangan negara salah satunya adalah piutang. Oleh karena itu dalam meningkatkan penerimaan negara, KPKNL Jayapura juga memfokuskan terhadap piutang negara. Adapun kegiatan pengurusan piutang itu meliputi : penerbitan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara (SP3N), Penarikan Berkas Kasus Piutang

Negara (BKPN), dan Biaya Administrasi (BIAD) Pengurusan Piutang Negara. Selain dari Piutang Negara, KPKNL Jayapura juga fokus terhadap lelang, dimana lelang merupakan penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga yang diberikan sesuai dengan jenis dan bentuk barang yang akan dilelang.

Untuk mencapai semua tujuan dari program tersebut, maka KPKNL Jayapura pada tahun 2023 mengagendakan beberapa kegiatan-kegiatan beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mendukung capaian target yang telah ditentukan.

Untuk mencapai visi, misi dan tujuan yang ditetapkan, KPKNL Jayapura menetapkan Sasaran Strategis (SS) beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur atas sasaran-sasaran yang akan dicapai. Pada tahun 2023 KPKNL Jayapura menetapkan 9 SS dengan 20 IKU yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. Adapun rincian SS dan IKU KPKNL Jayapura akan diuraikan pada tabel dibawah ini, yang mana meliputi target 2023 :

Tabel IV
Penetapan Kinerja KPKNL Jayapura Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	- Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang - Persentase Produktivitas Lelang	100% 80%
2.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa	- Persentase Realisasi Pokok Lelang - Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100% 100%

3.	• Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optima	• Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan • Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) • Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan • Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100% 100% 68% 100%
4.	• Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	• Deviasi ketergunaan hasil penilaian • Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	25% 70
5.	• Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	• Persentase Pelaksanaan Lelang Secara Online • Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN	90% 15%
6.	• Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang efektif	• Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%
7.	• Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	• Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran • Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	95,5% 100%
8.	• Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	• Indeks Integritas Organisasi • Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif • Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	94,33 60 100%

9. .	• Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	• Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko • Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	80 100%
---------	---	--	----------------

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai target dan realisasi kinerja KPKNL Jayapura pada tahun 2023. Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada KPKNL Jayapura pada tahun 2023 dapat kita lihat pada tabel IV, selanjutnya pada tabel ini V menampilkan perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan target pada tahun 2023, pada tabel VI menampilkan rincian capaian iku setiap triwulan 2023, pada tabel VII menampilkan perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2023 dan beberapa tahun terakhir dan pada uraian akhir akan dijelaskan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan termasuk analisis atas efesiensi penggunaan sumber daya dan analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara Target dan realisasi kinerja tahun 2023.

Mengacu kepada *Strategy Map* Kemenkeu *Three* KPKNL tahun 2023 yang mana dituangkan dalam sebuah perjanjian kontrak kinerja antara Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku dengan KPKNL. Dari hasil perjanjian kontrak kinerja tersebut, didapat 9 butir Sasaran Strategis (SS) dan 20 butir Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk lebih jelasnya, berikut kami tampilkan tabel capaian IKU Kemenkeu *Three* pada KPKNL Jayapura tahun 2023 yang disertai dengan target tahun 2023 dan realisasi yang dicapai pada tahun tersebut.

Tabel V
Realisasi Tahun 2023 dan Target 2023

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target 2023	Realisasi 2023	Indeks Maks. 120%	Keterangan
1	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	95.63%	95.63%	Kuning
2	Persentase Produktivitas Lelang	80%	124.88%	120.00%	Hijau
3	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	83.06%	83.06%	Kuning
4	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	100%	130.16%	120.00%	Hijau
5	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%	106.00%	106.00%	Hijau
6	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	120.00%	120.00%	Hijau
7	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%	76.10%	111.91%	Hijau
8	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	127.39%	120.00%	Hijau
9	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	0.95%	120.00%	Hijau
10	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	96.35	120.00%	Hijau
11	Persentase Pelaksanaan Lelang Secara Online	90%	99.13%	115.27%	Hijau
12	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	0.00%	120.00%	Hijau

13	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	100.00%	116.28%	Hijau
14	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran	95,50%	97.40	101.99%	Hijau
15	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	122.00%	120.00%	Hijau
16	Indeks Integritas Organisasi	94,33%	89.17%	101.33%	Hijau
17	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	97.13%	120.00%	Hijau
18	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%	90.00%	90.00%	Kuning
19	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	92.00%	115.00%	Hijau
20	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	120.00%	120.00%	Hijau

Pada Tabel V diatas menjelaskan tentang jumlah target yang ditetapkan pada tahun 2023 dibandingkan dengan realisasi yang terjadi pada tahun 2023. Perbandingan ini dilakukan agar kita mengetahui realisasi IKU pada tahun 2023 yang diperoleh, dan nilai yang direalisasikan pada tahun 2023 tersebut dijadikan sebagai salah satu acuan untuk menetapkan target yang harus dicapai pada tahun 2024. Tingginya suatu target yang ditetapkan dalam capaian kinerja berbanding lurus dengan nilai atau angka yang kita peroleh pada tahun sebelumnya.

Adapun rincian capaian kinerja atas 20 (Dua Puluh) IKU Kemenkeu-Three KPKNL Jayapura Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel VI

Rincian Capaian Kinerja 2023

K-Wide	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan				
	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	10%	30%	60%	100%	MAX/ TLK
				Rp18.747.100.000	
Realisasi (Rp)	4.758.025.237	7.654.306.690	12.722.692.907	17.927.697.158,00	
Capaiankontrak	24,85%	40,02%	67,86%	95.63%	
K-Wide	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan				
	1b-CP Persentase Produktivitas Lelang				

T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	30%	45%	60%	80.00% (Rp4.900.400.000)	MAX/ TLK
Realisasi (Rp)	54,97%	70,96%	98,40%	124.88%	
Capaiankontrak	54,97%	70,96%	98,40%	124.88%	
K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa				
	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	20%	40%	70%	100.00%	MAX/ TLK
Realisasi	21.089.789.873	51.128.888.128	128.304.774.239	258.114.353.327,00	
Capaiankontrak	6,78%	16,44%	41,25%	83.06%	
K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa				
	2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	10%	30%	60%	100.00%	MAX/ TLK
Realisasi	21.089.789.873	51.128.888.128	128.304.774.239	258.114.353.327,00	

Capaiankontrak	0,35%	0,61%	10,54%	130.16%	
K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal				
	3a-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	-	40%	60%	68.00%	MAX/ TLK
Realisasi	-	302	513	819	
Capaiankontrak	-	41,63%	66,54%	76.10%	
K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal				
	3b-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	10%	30%	60%	100.00%	MAX/ TLK
Realisasi	-	2	4,00	18	
Capaiankontrak	-	66,67%	133,33%	106.00%	
K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal				
	3c-CP Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP

Target	-	50%	55%	100.00%	MAX/ TLK
Realisasi	-	74,00%	79,00%	76,10%	
Capaiankontrak	-	78,00%	78,00%	120.00%	
K-Wide	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal				
	3d-CP Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	12%	32%	75%	100.00%	MAX/ TLK
Realisasi	27	100	183	224	
Capaiankontrak	38,54%	142,74%	261,21%	127.39%	
K-Wide	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional				
	4a-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	25%	25%	25%	25%	MAX/ TLK
Realisasi	0,80%	0,56%	1,07%	1,02%	
Capaiankontrak	1%	0%	1%	0.95%	
Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional					

K-Wide	4b-CP Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	70	70	70	70	MAX/ TLK
Realisasi	100,00%	98,60%	96,06%	95,74%	
Capaiankontrak	1,00	0,99	96,06%	96.35	
K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif				
	5a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang Secara Online				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	57%	67%	78%	86.00%	MAX/ TLK
Realisasi	100%	99,44%	100,00%	99.13%	
Capaiankontrak	100%	99,44%	100,00%	115.27%	
K-Wide	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif				
	5b-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	15%	15%	15%	15.00%	MAX/ TLK
Realisasi	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

Capaiankontrak	200.00%	200.00%	200.00%	200.00%	
K-Wide	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang efektif				
	6a-CP Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	-	50%	50%	86.00%	MAX/ TLK
Realisasi	-	53,52%	88,71%	100.00%	
Capaiankontrak	-	53,52%	88,71%	116.28%	
K-Wide	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal				
	7a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	96%	96%	96%	95.50	MAX/ TLK
Realisasi	100,00%	100,00%	99,95%	97.40	
Capaiankontrak	100,00%	100%	99,95%	108,67%	
K-Wide	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal				
	7b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP

Target	-	-	-	100.00%	MAX/ TLK
Realisasi	-	-	-	122.00%	
Capaiankontrak	-	-	-	122.00%	
K-Wide	Penguatan pengawasan pengendalian internal yang efektif				
	8a-CP Indeks Integritas Organisasi				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	-	-	-	88.00%	MAX/ TLK
Realisasi	-	-	-	89.17%	
Capaiankontrak	-	-	-	101.33%	
K-Wide	Penguatan pengawasan pengendalian internal yang efektif				
	8b-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	-	-	-	60.00%	MAX/ TLK
Realisasi	-	-	-	97.13%	
Capaiankontrak	-	-	-	161.88%	
Penguatan pengawasan pengendalian internal yang efektif					

K-Wide	8c-N Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	-	-	-	100.00%	MAX/ TLK
Realisasi	-	-	-	90.00%	
Capaiankontrak	-	-	-	90.00%	
K-Wide	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi				
	9a-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	-	-	-	80.00%	MAX/ TLK
Realisasi	-	-	-	92.00%	
Capaiankontrak	-	-	-	115.00%	
K-Wide	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi				
	9b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai				
T/R	Q1	Q2	Q3	Q4	Pol/KP
Target	15%	40%	75%	100.00%	MAX/ TLK
Realisasi	56,84%	114,29%	100,00%	120.00%	

Capaian kontrak	56,84%	114,29%	100,00%	120.00%	
-----------------	--------	---------	---------	---------	--

Berdasarkan tabel diatas dapat kita lihat bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) pada tahun 2023, hampir seluruh IKU berhasil dicapai sesuai target secara maksimal. Apabila kita melihat secara keseluruhan, hasil capaian kinerja KPKNL pada tahun ini sudah cukup baik, namun masih dapat dioptimalkan.

a. Capaian kinerja dalam kurun waktu sampai dengan beberapa tahun terakhir

Tabel VII

Realisasi Kinerja Tahun 2023, 2022, 2021, dan tahun 2020

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020
1.	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	95.63%	183,33%	151,43%	103,27%
2.	Persentase Produktivitas Lelang	124.88%	141,69%	43,16%	36,95%
3	Persentase Realisasi Pokok Lelang	83.06%	216,74%	168,02%	84,71%
4	Persentase Penurunan Nilai Outstanding Piutang Negara	130.16%	164,24%	101%	56,12%
5	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	106.00%	114,66%	102,86%	103,06%
6	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	120.00%	160%	153,85%	115%
7	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	76.10%	110,11%	69,55%	101,11%
8	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	127.39%	120%	122,22%	116,67%
9	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	0.95%	0,45%	0%	0,90%

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Realisasi 2023	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Realisasi 2020
10	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	96.35	-	-	-
11	Persentase Pelaksanaan Lelang Secara Online	99.13%	107,72%	100%	100%
12	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	0.00%	0%	0,40%	-
13	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	100.00%	105%	88,52%	-
14	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran	97.40	100,62%	100,62%	100%
15	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	122.00%	120%	-	-
16	Indeks Integritas Organisasi	89.17%	-	-	-
17	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	97.13%	-	-	-
18	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	90.00%	-	-	-
19	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	92.00%	-	-	-
20	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	120.00%	120%	120%	120%

3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) yang telah disepakati dengan Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, yang mana dituangkan dalam Perjanjian Kontrak Kinerja, maka dihasilkan *Strategy Map* Kemenkeu-*Three* KPKNL. Dari hasil Kemenkeu *Three* ini, KPKNL Jayapura melaksanakan tugasnya sesuai kontrak kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai, perlu dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran Kinerja Kegiatan memuat program yang dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan dimana setiap kegiatan memuat uraian kegiatan, indikator kegiatan, satuan dari target kegiatan, realisasi capaian dan persentase pencapaian target.

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan perwujudan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi yang bersangkutan. Sesuai hasil pengamatan tingkat pencapaian hasil (*outcome*) kegiatan tahun 2023 dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan, capaian kegiatan telah cukup baik, namun masih dapat dimaksimalkan.

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel VIII

Komposisi Jumlah SDM KPKNL Jayapura Per-Seksi

No.	Uraian	Pejabat	Pelaksana	Honorer	Jumlah
1.	Kepala Kantor	1 orang	-	-	1 orang
2.	Sub Bagian Umum	1 orang	3 orang	6 orang	10 orang
3.	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	(1 orang)	4 orang	-	5 orang
4.	Seksi Piutang Negara	(1 orang)	1 orang	-	2 orang
5.	Seksi Hukum & Informasi	1 orang	2 orang	-	3 orang
6.	Seksi Kepatuhan Internal	(1 orang)	1 orang	-	2 orang
7.	Jabatan Fungsional Pelelang	2 orang	-	-	2 orang
8.	Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah	2 orang	-	-	2 orang
.	Jumlah	10 orang	11 orang	6 orang	27 orang

Tabel IX

Jumlah Pejabat Fungsional & Non Fungsional pada KPKNL Jayapura Per-Seksi

No.	Uraian	Penilai	Pejabat Lelang	Pemeriksa	Juru Sita	Jumlah Riil
1.	Kepala Kantor	-	-	-	-	-
2.	Sub Bagian Umum	-	-	-	-	-
3.	Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara	-	-	-	-	-
4.	Seksi Piutang Negara	-	-	-	-	-
5.	Jabatan Fungsional Pelelang	-	2	-	-	2 orang
6.	Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah	2	-	-	-	2 orang
7.	Seksi Hukum & Informasi	1	-	1	-	1 orang
8.	Seksi Kepatuhan Internal	-	-	-	1	1 orang
9.	Jumlah	3	2	1	1	7 orang

Berdasarkan tabel VII dan VIII diatas dan dapat kita lihat juga pada Bab I. Tabel I. Komposisi Pegawai KPKNL Jayapura Berdasarkan Golongan, Tabel II. Komposisi Pegawai KPKNL Jayapura Berdasarkan Pendidikan, Tabel III. Jumlah Jabatan Tenaga Fungsional bahwa dalam rangka

menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPKNL Jayapura telah dilakukan secara efisien dan optimal dengan jumlah sumber daya yang ada.

5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Tabel X

Analisis program /kegiatan yang menunjang
Pencapaian pernyataan kinerja

No.	Uraian Program	Input Kegiatan	Proses	Output Kegiatan	Outcome Kegiatan
1.	Percepatan pelayanan pengurusan piutang negara;	Penerimaan Penyerahan Piutang Negara	Resume BKPN	Penerbitan Surat Penerimaan Pengurusan Piutang Negara(SP3N), Penarikan Berkas Kasus Piutang Negara(BKPN), dan Biaya Administrasi (BIAD) Pengurusan Piutang Negara.	Tercapainya penurunan <i>outstanding</i> BKPN
2.	Peningkatan pelayanan pengelolaan Kekayaan negara	Penerbitan PSP, SK Penghapusan Dan Persetujuan Sewa	Setelah berkas dinyatakan lengkap	Terbit SK	Peningkatan Aspek Pengelolaan Kekayaan Negara pada satker K/L

No.	Uraian Program	Input Kegiatan	Proses	Output Kegiatan	Outcome Kegiatan
3.	Peningkatan pelayanan lelang	Permohonan lelang, Permintaan Kutipan RL, Permintaan SKPT	Penetapan Lelang, Pembuatan Risalah Lelang, Kutipan dan Salinan Lelang	Pelaksanaan Lelang, Risalah Lelang, Kutipan dan Salinan Lelang	Peningkatan target lelang, frekuensi lelang dan bea lelang
4.	Peningkatan pelayanan penilaian	Permohonan penilaian BMN satker K/L	berkas dinyatakan lengkap	Laporan penilaian, laporan Hasil Kaji Ulang penilaian, DKPB	LKPP WTP
5.	Optimalisasi upaya penanganan perkara;	Permohonan penerbitan SKU, menghadiri sidang mediasi, replik, duplik, memori banding dan kasasi	Gugatan lengkap, sidang	Putusan Pengadilan	Adanya Kepastian Hukum

No.	Uraian Program	Input Kegiatan	Proses	Output Kegiatan	Outcome Kegiatan
6.	Peningkatan pelayanan di bidang kepegawaian;	Usulan Kenaikan pangkat, mutasi pegawai	Surat Pengajuan Usulan ke Kantor Pusat	SK Kenaikan pangkat	Penyesuaian Kenaikan Pangkat Pegawai
7.	Peningkatan pelayanan di bidang keuangan	Usulan Kenaikan gaji berkala dan pembayaran gaji/honorarium pegawai	Pembuatan Daftar gaji dan usulan pembayaran honor	Penerimaan gaji oleh pegawai	Kesejahteraan pegawai
8.	Peningkatan pelayanan di bidang rumah tangga	Penyediaan sarana dan prasarana kantor	belanja	Tersedianya sarana dan prasarana kantor yang dibutuhkan	Kenyamanan pegawai dalam bekerja
9.	Peningkatan efektivitas pengelolaan kekayaan negara	Edukasi kepada satker K/L	Melalui surat, kunjungan dan sosialisasi	Surat dan Notulen	Peningkatan sisi pengelolaan BMN satker

No.	Uraian Program	Input Kegiatan	Proses	Output Kegiatan	Outcome Kegiatan
10.	Peningkatan penerimaan dan pengamanaan keuangan negara	Edukasi kepada stakeholder melalui Sosialisasi, koordinasi dan penggalian potensi lelang Kepada stakeholder Perbankan maupun K/L	Lelang HT, Lelang BMN, Lelang Sukarela	Terdapat 329 frekuensi lelang dan penerimaan pokok lelang sebesar Rp 287,316 M	Apresiasi masyarakat terhadap lelang dan Penerimaan PNBP meningkat.

6. Analisis atas pelaksanaan rencana aksi atau mitigasi risiko yang telah disusun dalam pencapaian kinerja.

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan Kinerja (PK) yang telah disepakati dengan Kantor Wilayah DJKN Papua, Papua Barat dan Maluku, yang mana dituangkan dalam Perjanjian Kontrak Kinerja, maka dihasilkan Strategy Map Kemenkeu-Three KPKNL. Dari hasil Kemenkeu Three ini, KPKNL Jayapura melaksanakan tugasnya sesuai kontrak kinerja yang telah disepakati dan ditetapkan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan yang telah dicapai, perlu dilakukan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran Kinerja Kegiatan memuat program yang dijabarkan ke dalam kegiatan-kegiatan dimana setiap kegiatan memuat uraian kegiatan, indikator kegiatan, satuan dari target kegiatan, realisasi capaian dan persentase pencapaian target.

Pengukuran kinerja kegiatan merupakan perwujudan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dalam kurun waktu satu tahun sebagai wujud pertanggungjawaban kinerja instansi yang bersangkutan. Sesuai hasil pengamatan tingkat pencapaian hasil (outcome) kegiatan tahun 2023 dapat ditarik kesimpulan bahwa seluruh kegiatan pencapaiannya telah maksimal.

7. Rencana Aksi ke depan

Penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk tahun 2024 nantinya, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah-masalah tahun ini tidak terulang lagi ditahun depan, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi kepada seluruh pihak-pihak terkait yang bersangkutan dengan utang piutang;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian pengurusan piutang negara, dan lelang;
3. Melakukan penggalian potensi lelang;
4. Melakukan penggalian potensi piutang negara;
5. KPKNL akan melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Kantor Wilayah masing-masing satker;
6. Mengikutkan pegawai untuk diklat yang mendukung kinerja kantor;
7. Peningkatan pelatihan penilaian secara berkesinambungan baik bagi pelaksana maupun pejabat.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) ini kami mengharapkan agar berguna bagi para *stakeholder*, menjadi dasar acuan dalam rangka pengambilan keputusan dan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.

B. Realisasi Penggunaan Anggaran DIPA tahun 2023

Realisasi penggunaan anggaran yang telah ditetapkan dalam bentuk DIPA pada tahun 2023, merupakan pengukuran yang dilakukan atas seberapa besarnya proses penyerapan anggaran yang terjadi pada KPKNL Jayapura selama tahun anggaran. Sedikitnya penyerapan anggaran terjadi pada tahun tersebut, akan berdampak pada pemberian anggaran untuk tahun berikutnya. Adapun tabel penggunaan anggaran DIPA tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel XI

Penggunaan Anggaran DIPA tahun 2023

No	Uraian	DIPA (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Belanja Pegawai	0	0	0%
2	Belanja Barang	1.935.010.000	1.718.285.617	88,80%
3	Belanja Modal	356,399,000	343,999,000	96,52%
	Jumlah	1.935.010.000	1.718.285.617	88,80%

Dari tabel diatas dapat kita lihat, bahwa terdapat penyerapan hampir maksimal dari keseluruhan pengeluaran belanja, baik belanja pegawai, belanja modal, maupun belanja modal pada tahun 2023. Untuk lebih jelasnya maka kami mencoba menguraikan sebagai berikut:

Realisasi anggaran belanja selama tahun 2023 sebesar 88,80% atau 1.718.285.617,- dari total anggaran belanja sebesar Rp 1.935.010.000,-. Secara capaian pada tahun 2023 penyerapan anggaran pada tahun ini mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu penyerapan anggaran tahun 2022 adalah sebesar 89.05%.

BAB IV PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan KPKNL Jayapura sebagai salah satu unit penyelenggara Pemerintahan.

Dengan disusunnya LAKIN dapat diketahui sampai sejauh mana kinerja yang telah dilaksanakan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan. Dari hasil pengukuran kinerja dapat digambarkan hasil yang telah dicapai untuk setiap sasaran sebagai berikut :

1. Persentase pencapaian target pokok lelang sebesar 83,06% target dan di tahun mendatang perlu ditingkatkan.
2. Persentase efektivitas penyelesaian BKPN sebesar 120% dari target 100% yang ditetapkan dan di tahun mendatang harus dipertahankan
3. Penyerapan anggaran belanja cukup baik dan sampai tanggal 31 Desember 2023 untuk belanja barang 88,80% dan untuk belanja modal 96,52%
4. Pengelolaan anggaran DIPA yang telah ditetapkan sebesar Rp1.935.010.000,- terealisasi sebesar Rp1.718.285.617,- atau sebesar 88,80%%.
5. Persentase capaian target produktivitas lelang sebesar 120% dari target 80% yang ditetapkan adalah pencapaian yang melebihi target dan di tahun mendatang harus dipertahankan.
6. Persentase bidang tanah BMN yang disertifikatkan sebesar 110% adalah pencapaian yang optimal dan perlu dipertahankan untuk tahun berikutnya.

Dari data hasil capaian diatas, terdapat beberapa target yang sudah optimal dicapai pada tahun 2023 ini, namun masih perlu ditingkatkan. Hal ini disebabkan karena ada beberapa faktor, yaitu:

1. Belum meluasnya informasi tentang lelang ke masyarakat;
2. Kemampuan satker dalam melakukan penatausahaan BMN masih kurang;
3. Kurang pahamnya beberapa satker tentang pengoperasian aplikasi SIMAN;
4. Kurangnya kemampuan penanggung utang
5. Jumlah BKPN baru yang belum pasti
6. Penyerah piutang potensial terkendala berkas kelengkapan permohonan penyerahan
7. Wilayah kerja yang luas, sementara transportasi minim;
8. Keterbatasan kemampuan pegawai dalam beracara di pengadilan.

Penyusunan LAKIN ini diharapkan dapat memberikan gambaran untuk tahun 2024 nantinya, sehingga dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Adapun cara yang dapat dilakukan untuk mencegah masalah-masalah tahun ini tidak terulang lagi ditahun depan, adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi kepada seluruh pihak-pihak terkait yang bersangkutan dengan utang piutang;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan kekayaan negara, penilaian pengurusan piutang negara, dan lelang;
3. Melakukan penggalian potensi lelang;
4. Melakukan penggalian potensi piutang negara;
5. KPKNL akan melakukan koordinasi dan sosialisasi dengan Kantor Wilayah masing-masing satker;
6. Mengikutkan pegawai untuk diklat yang mendukung kinerja kantor;
7. Peningkatan pelatihan penilaian secara berkesinambungan baik bagi pelaksana maupun pejabat.

Pada tahun 2023 KPKNL Jayapura telah meraih berbagai macam penghargaan diantaranya :

1. Penghargaan IKPA Terbaik Ke-3 Kategori Pagu Kecil Semester I Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh KPPN Jayapura
2. Juara Harapan II Kedai Lelang UMKM Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Direktorat Lelang
3. Juara Favorit Kedai Lelang UMKM Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Direktorat Lelang
4. Juara 3 Lomba Video Ajang Kreativitas Insan Lelang Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh

Direktorat Lelang

5. Juara 1 Fashion Show dalam rangka HORI Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Perwakilan Kemenkeu Papua
6. Juara 1 Tenis Meja dalam rangka HORI Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Perwakilan Kemenkeu Papua
7. Juara 1 Tenis Lapangan dalam rangka HORI Tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Sekretariat Perwakilan Kemenkeu Papua

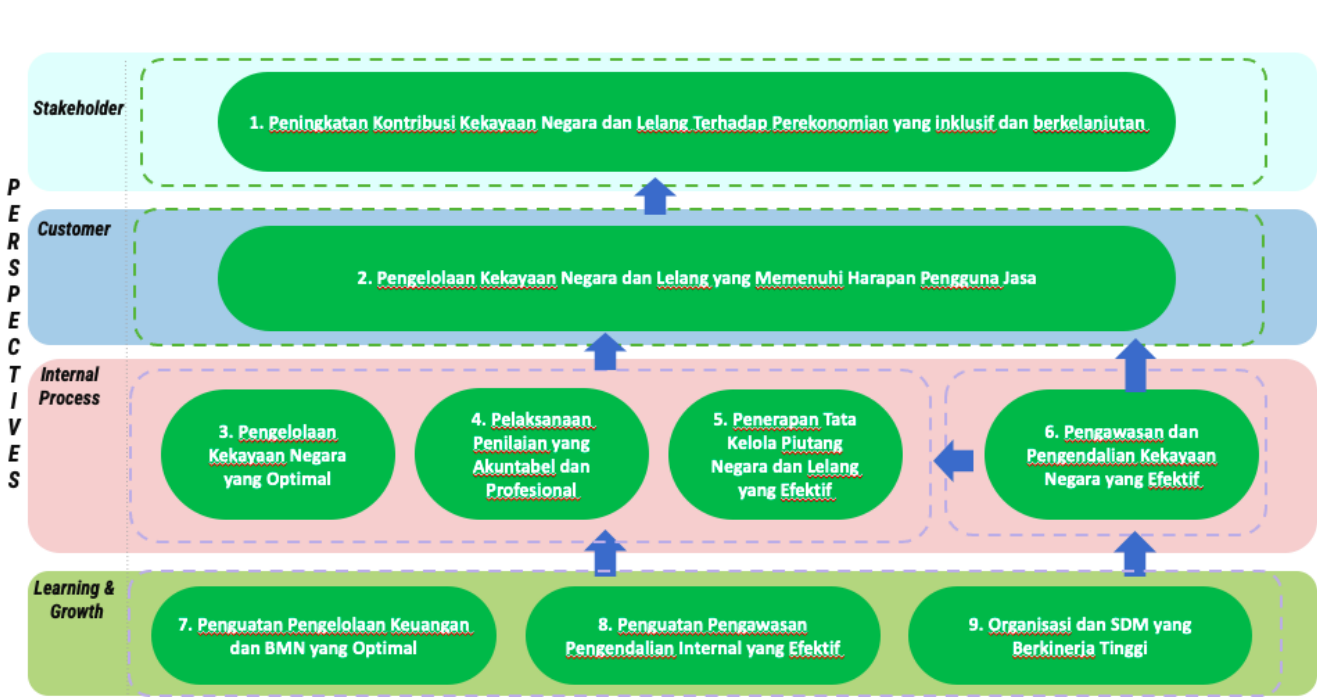
Dengan disusunnya Laporan Kinerja (LAKIN) ini kami mengharapkan agar berguna bagi para *stakeholder*, menjadi dasar acuan dalam rangka pengambilan keputusan dan penyusunan Rencana Kinerja Tahunan.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-02/WKN.17/2023
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN
LELANG JAYAPURA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

Peta Strategi



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAYAPURA
KANTOR WILAYAH DJKN PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan	1a-CP Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%
		1b-CP Persentase Produktivitas Lelang	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa	2a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%
		2b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal	3a-CP Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%
		3b-CP Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%
		3c-CP Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%
		3d-CP Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional	4a-CP Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%
		4b-CP Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif	5a-CP Persentase Pelaksanaan Lelang Secara Online	90%
		5b-CP Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang efektif	6a-CP Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%
7	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal	7a-CP Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran	95,5%
		7b-N Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%
8	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif	8a-CP Indeks Integritas Organisasi	94,33
		8b-N Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60



No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		8c-N Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%
9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi	9a-N Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80
		9b-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%

Program/Kegiatan Tahun 2023

Anggaran

Program:

Pengelolaan Perbendaharaan , Kekayaan Negara, dan Risiko Rp **522.589.000,00**

Kegiatan

1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi
- Rp7.098.000,00
2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko
- Rp-
3. Pengelolaan Aset
- Rp515.491.000,00

Program:

Dukungan Manajemen Rp **1.741.638.000,00**

1. Legislasi dan Litigasi
- Rp21.640.000,00
2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum
- Rp1.701.518.000,00
3. Pengelolaan komunikasi dan informasi publik
- Rp9.856.000,00
4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal
- Rp8.624.000,00

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku



Ditandatangani Secara Elektronik
Nikodemus Sigit Rahardjo

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jayapura



Ditandatangani Secara Elektronik
Dadang Eko Darminto



RINCIAN TARGET KINERJA
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
JAYAPURA
KANTOR WILAYAH DJKN PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
1	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan							
1a-CP	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
1b-CP	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
2	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang memenuhi Harapan Pengguna Jasa							
2a-CP	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%
2b-CP	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
3	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal							
3a-CP	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
3b-CP	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
3c-CP	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	55%	55%	68%	68%
3d-CP	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%
4	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional							
4a-CP	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
4b-CP	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
5	Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif							
5a-CP	Persentase Pelaksanaan Lelang Secara Online	57%	67%	67%	78%	78%	90%	90%



Kode SS/IKU	SS dan IKU	Target						
		Q1	Q2	Smt. 1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
5b-CP	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
6	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang efektif							
6a-CP	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	50%	-	50%	86%	86%
7	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal							
7a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran	95,5%	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5 %	95,5%	95,5%
7b-N	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%
8	Penguatan pengawasan-pengendalian internal yang efektif							
8a-CP	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	94,33	94,33
8b-N	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	-	-	-	-	-	60	60
8c-N	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100%	100%
9	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi							
9a-N	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	80	80
9b-N	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
Dan Lelang Jayapura,



Ditandatangani Secara Elektronik
Dadang Eko Darminto



INISIATIF STRATEGIS
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAYAPURA
KANTOR WILAYAH DJKN PAPUA, PAPUA BARAT DAN MALUKU
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2023

No.	IKU	Inisiatif Strategis	Output/Outcome	Trajectory		Periode Pelaksanaan	Penanggung Jawab	Biaya (Rp)
				Kegiatan	Output			
1	Persentase SS: Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan IKU: Persentase realisasi penerimaan negara dari pengelolaan kekayaan negara dan lelang	Meningkatkan koordinasi dengan Pegadaian agar lebih intensif dalam pelaksanaan lelang	1. Meningkatkan pokok lelang dari Pegadaian 2. Meningkatkan PNPB dari bea lelang Pegadaian	koordinasi dengan Pegadaian agar lebih intensif dalam pelaksanaan lelang	Laporan Monitoring Kegiatan	12 Bulan	Fungsional Pelelang	-



Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan
Lelang Jayapura



Ditandatangani Secara Elektronik
Dadang Eko Darminto



SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA	
NAMA	Dadang Eko Darminto, S.E., M.M.		NAMA	Nikodemus Sigit Rahardjo
NIP	197405111999031001		NIP	197209021993011001
PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Tingkat I, IV/b		PANGKAT/ GOL RUANG	Pembina Utama Muda, IV/c
JABATAN	Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jayapura		JABATAN	Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku
UNIT KERJA	Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jayapura		UNIT KERJA	Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku
NO	RENCANA HASIL KERJA	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET	PERSPEKTIF
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A. UTAMA				
1.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	100%	Penerima Layanan
2.	Peningkatan Kontribusi Kekayaan Negara dan Lelang Terhadap Perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase Produktivitas Lelang	80%	Penerima Layanan



	Barat, dan Maluku)			
3.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase Realisasi Pokok Lelang	100%	Penerima Layanan
4.	Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	100%	Penerima Layanan
5.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	100%	Proses Bisnis
6.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	100%	Proses Bisnis
7.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	68%	Proses Bisnis
8.	Pengelolaan Kekayaan Negara yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	100%	Proses Bisnis



9.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	Proses Bisnis
10.	Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	Proses Bisnis
11.	Penguatan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase Pelaksanaan Lelang Secara Online	90%	Proses Bisnis
12.	Penguatan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	Proses Bisnis
13.	Pengawasan dan Pengendalian Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	86%	Proses Bisnis
14.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran	95,5%	Penguatan Internal atau Anggaran



	Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)			
15.	Penguatan Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
16.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Indeks Integritas Organisasi	94,33	Penguatan Internal atau Anggaran
17.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	60	Penguatan Internal atau Anggaran
18.	Penguatan Pengawasan-Pengendalian Internal yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
19.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	80	Penguatan Internal atau Anggaran



20.	Organisasi dan SDM yang berkinerja tinggi (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Papua, Papua Barat, dan Maluku)	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	100%	Penguatan Internal atau Anggaran
-----	---	---	------	-------------------------------------

B. TAMBAHAN

PERILAKU KERJA		
1	Berorientasi pelayanan	
	- Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan.
2	Akuntabel	
	- Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
3	Kompeten	
	- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.



PERILAKU KERJA		
4	Harmonis	
	- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.
5	Loyal	
	- Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.
6	Adaptif	
	- Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.
7	Kolaboratif	
	- Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama	Ekspektasi Khusus Pimpinan: Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.



Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Dadang Eko Darminto

197405111999031001

31 Januari 2023

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Nikodemus Sigit Rahardjo

197209021993011001



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2023

DUKUNGAN SUMBER DAYA									
1.	21 pegawai								
2.	Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain.								
SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN									
1.	Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan								
	No	IKI	Target						
			Q1	Q2	Smt.1	Q3	s.d.Q3	Q4	Y
	1	Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
	2	Persentase Produktivitas Lelang	30%	45%	45%	60%	60%	80%	80%
	3	Persentase Realisasi Pokok Lelang	20%	40%	40%	70%	70%	100%	100%



4	Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
5	Persentase Barang Milik Negara Berupa Tanah yang Disertipikatkan	-	40%	40%	60%	60%	100%	100%
6	Persentase Penyelesaian Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)	10%	30%	30%	60%	60%	100%	100%
7	Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan	-	50%	50%	55%	55%	68%	68%
8	Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)	12%	32%	32%	75%	75%	100%	100%
9	Deviasi ketergunaan hasil penilaian	25%	25%	25%	25%	25%	25%	25%
10	Rata-rata Indeks Penyelesaian Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien	70	70	70	70	70	70	70
11	Persentase Pelaksanaan Lelang Secara Online	57%	67%	67%	78%	78%	90%	90%
12	Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%
13	Tingkat Efektifitas Pembinaan dan Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Barang Milik Negara	-	50%	50%	-	50%	86%	86%
14	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan Anggaran	95,5 %	95,5 %	95,5%	95,5 %	95,5%	95,5 %	95,5 %
15	Persentase Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	10%	50%	50%	85%	85%	100%	100%
16	Indeks Integritas Organisasi	-	-	-	-	-	94,33	94,33
17	Indeks Pengawasan dan Pengendalian yang efektif	-	-	-	-	-	60	60



18	Indeks Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM	-	-	-	-	-	100%	100%
19	Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko	-	-	-	-	-	80	80
20	Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai	15%	40%	40%	75%	75%	100%	100%
KONSEKUENSI								
1.	<i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							
2.	<i>Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.</i>							

31 Januari 2023

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Dadang Eko Darminto

197405111999031001

Ditandatangani secara elektronik

Nikodemus Sigit Rahardjo

197209021993011001







KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT LELANG

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 7 UTARA (APT) JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NOMOR 2-4,
JAKARTA 10710; CALL CENTER 1500-991; SITUS WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID

NOTA DINAS
NOMOR ND-823/KN.6/2023

Yth. : 1. Para Kepala Kanwil DJKN
2. Para Kepala KPKNL
Dari : Direktur Lelang
Sifat : Segera
Lampiran : Satu Set
Hal : Penyampaian Piagam Penghargaan KEDAI Lelang UMKM Tahun 2023
Tanggal : 5 Desember 2023

Sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan Kompetisi dan Inovasi Lelang Produk UMKM (KEDAI Lelang UMKM) tahun 2023, bersama ini kami menyampaikan apresiasi kepada para peserta dan dewan juri yang terlibat dalam kegiatan KEDAI Lelang tahun 2023.

Terkait hal tersebut, berikut dapat kami sampaikan piagam penghargaan sebagai wujud apresiasi kami yang dapat diunduh melalui tautan [Piagam Penghargaan KEDAI Lelang UMKM Tahun 2023](#).

Atas perhatian dan kerja sama Saudara/Saudari, kami mengucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Joko Prihanto

Tembusan:
Sekretaris Direktorat Jenderal Kekayaan Negara





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
DIREKTORAT LELANG

GEDUNG SYAFRUDIN PRAWIRANEGARA II LANTAI 7 UTARA (APT) JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4,
JAKARTA 10710; CALL CENTER 1500-991; SITUS WWW.DJKN.KEMENKEU.GO.ID

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-1/KN.6/2023

TENTANG
PENGUMUMAN 3 (TIGA) BESAR AJANG KREATIVITAS INSAN LELANG INDONESIA

Sehubungan dengan telah berakhirnya kegiatan penjurian Ajang Kreativitas Insan Lelang Indonesia, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendaftaran Ajang Kreativitas Insan Lelang Indonesia meliputi lomba foto, lomba video pendek, dan lomba *tagline* telah dibuka untuk pegawai DJKN, karyawan Balai Lelang, serta Pejabat Lelang Kelas II, mulai dari tanggal 14 April s.d. 16 Juni 2023 sebagai rangkaian kegiatan 115 Tahun Lelang Indonesia.
2. Ajang Kreativitas Insan Lelang Indonesia dilaksanakan secara obyektif sesuai dengan kriteria yang ditentukan pada tanggal 26 Juni s.d. 5 Juli 2023 oleh dewan juri.
3. Berdasarkan hasil penjurian terhadap 40 foto, 27 video, dan 36 *tagline*, kami sampaikan 3 (tiga) besar peserta yang meraih nilai tertinggi dari masing-masing lomba yaitu sebagai berikut:

Lomba Foto		Lomba Video		Lomba Tagline	
Nama Peserta	Unit Asal	Nama Peserta	Unit Asal	Nama Peserta	Unit Asal
Priyanda Bagus Pratama	Sekretariat DJKN	- Agus Kurniawan - Tri Wibowo - Dwito Joko Priyono	KPKNL Semarang	H. Jasril, S.H., S.E.	Pejabat Lelang Kelas II Wiljab Pekanbaru
Liz Juelita	Kanwil DJKN Kalimantan Barat	- Angga Christofel - Furra Pisga Pemasela	KPKNL Kupang	Gugun Sugara	KPKNL Bandar Lampung
I Dewa Ayu Oka Maya Saputri Artini	Kanwil DJKN Bali Nusra	- Ery Subagiyo - Hubertus Sikstus B.S.W. - La Ode Abdul Machmud	KPKNL Jayapura	Maulana Gilang Firdaus	KPPN Tipe A1 Dumai sebelumnya Kanwil DJKN Sulawesi Utara, Tengah, Gorontalo, dan Maluku Utara

4. Selanjutnya, untuk juara I, II, dan III akan diumumkan pada saat Acara Puncak 115 Tahun Lelang Indonesia tanggal 18 Juli 2023 di Gedung Dhanapala, Jakarta Pusat.

Demikian disampaikan. Pengumuman ini hendaknya dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Juli 2023
Direktur Lelang



Ditandatangani secara elektronik
Joko Prihanto

Tembusan:

Direktur Jenderal Kekayaan Negara





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada

**Tim KEDAI Lelang UMKM 2023
KPKNL Jayapura**

Sebagai

JUARA FAVORIT
**KOMPETISI DAN INOVASI LELANG SUKARELA PRODUK UMKM
(KEDAI LELANG UMKM) TAHUN 2023**

Jakarta, 24 Oktober 2023

Direktur Jenderal Kekayaan Negara


RIONALD SILABAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada

**Tim KEDAI Lelang UMKM 2023
KPKNL Jayapura**

Sebagai

JUARA HARAPAN KEDUA

**KOMPETISI DAN INOVASI LELANG SUKARELA PRODUK UMKM
(KEDAI LELANG UMKM) TAHUN 2023**

KATEGORI KPKNL

Jakarta, 24 Oktober 2023

Direktur Jenderal Kekayaan Negara


RIONALD SILABAN



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

DJKN 15

PIAGAM PENGHARGAAN

diberikan kepada

Ery Subagio

*Hubertus Sikeatus Basa Sare Mendo
& Ade Ataul Machmud*

Sebagai

JUARA III

LOMBA VIDEO

AJANG KREATIVITAS INSAN LELANG TAHUN 2023

Jakarta, 18 Juli 2023

Direktur Jenderal Kekayaan Negara


RIONALD SILABAN